

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan

Sebagai dijadikan acuan berfikir dalam memecah masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan konsep dan teori yang relevan untuk mendukung dalam memecahkan permasalahan yang telah diuraikan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengkaitan dengan beberapa pendapat para ahli yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan untuk dapat memecahkan permasalahan untuk memperoleh penyelesaian yang baik.

1. Konsep Pemerintahan

Di dalam suatu Negara konsep pemerintah, dibedakan menjadi dua bagian yaitu pemerintah dalam arti luas dan sempit. Konsep pemerintah dalam arti luas adalah keseluruhan tugas dan wewenang yang dimiliki pemerintah setelah mendapatkan legitimasi atau lembaga Negara seperti Eksekutif, Legislatif, Yudukatif. Sedangkan konsep pemerintah dalam arti sempit meliputi fungsi yang dijalankan oleh lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan disebut Eksekutif. Menurut.¹

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang artinya seseorang atau badan yang mendapatkan legitimasi untuk dapat memerintah pihak lain dan adanya dua pihak yang saling berhubungan antara memerintah dengan memiliki wewenang dan pihak yang diperintah untuk menjalankan perintah.

¹ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Volume 12 (1997)

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Karena seorang pemerintah yang bisa menjalankan dengan baik roda pemerintahannya adalah pemerintah yang mengetahui bagaimana cara atau seni agar bisa memerintah dengan baik dengan mendapatkan pendidikan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan itu disebut menjadi disiplin ilmu Karen memenuhi semua syarat untuk dijadikan ilmu seperti pemerintahan dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek materil dan forma,bersifat universal, dan mempunyai sistematika dengan spesifik.

Penulis menyampaikan berbagai defenisi tentang ilmu pemerintahan menurut para ahli :

Pemerintah memiliki 3 fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan, untuk menjalankan ketiga fungsi pemerintahan tersebut pemerintah menetapkan kebijakan disebut kebijakan pemerintah. pemerintahan adalah sebagai badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sedangkan pemerintah adalah proses dari pemenuhan dan melindungi kebutuhan masyarakat.²

Ilmu pemerintahan adalah sebagai badan yang penting dalam pemerintahannya, pemerintah harus memeperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh masyarakat, serta keberadaan legistimasi. ³

Pemerintahan dalam arti luas memepunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara,kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai

² Ndara (2005:36)

³ Sumendar (dalam Syafiie 2003;136)

kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kedua mempunyai kekuatan legislative dalam pembuatan undang-undang, ketiga harus mempunyai kekuatan financial untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam membiayai keberadaan negaran dalam penyelenggaraan peraturan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.⁴ Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan pimpinan dengan sebaik-baiknya.⁵

ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum⁶. Ilmu pemerintahan adalah suatu organisasi dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, dan bagaimana manusia bisa diperintah.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemerintahan dapat dibagi dalam arti luas dan arti sempit, pemerintahan dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah presiden/eksekutif saja. Dan Menurut Kuntjoro Purbopranoto pemerintah dalam arti luas adalah seluruh urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sedangkan dalam arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.⁸

2. Kebijakan Publik

⁴C.F Strong (dalam Syafiie 2003:136)

⁵D.G.A Van Poelje (dalam Syafiie 2005:21)

⁶U.Rosenthal (dalam Syafiie 2005:21)

⁷R.Mac Iver (dalam Syafiie 2005:22)

⁸Munaf 2016:77

Kebijakan adalah perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberikan makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis⁹.

Kebijakan menurut Mustopadidjaja adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan – ketentuan yang dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksanaan kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksanaan maupun dengan kelompok dengan sasaran yang dimaksud¹⁰.

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat¹¹. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan¹².

3. Konsep Evaluasi

Menurut evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.¹³

Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya adalah:

1. Model *Before-After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku,treatment) tolak ukurnya adalah kondisi *before*.

⁹ Jones dalam Said Zainal Abidin (2012 : 6)

¹⁰ Nurcholis, 2005 : 190

¹¹ Said Zainal (2012 : 19)

¹² Nugroho (2008 : 55)

¹³ Ndraha (2011;201-202)

2. Model *Das Solen-Das Sein*, yaitu perbandingan antara seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *das solen*.
3. Model kelompok control-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tampa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya kelompok kontrol.

Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik.

Adapun menurut Taliziduhu Ndara dalam buku konsep Administrasi dan Administrasi Di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasil. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya.

Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi.

Evaluasi mempunyai arti yang saling berhubungan, masing-masing menunjuk pada beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilain (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini

karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran¹⁴. Fungsi evaluasi menurut William N. Dunn adalah ;

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai kesepatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap pada nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai juga kritik dengan menyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju..
3. Evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah rekomendasi. Infomasi tentang tidak memandainya kinerja dapat memberikan sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu di defenisi ulang.
4. Evaluasi dapat juga menyumbang pada defenisi altenatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan yang menunujkkan bahwa altenatif kebijakan diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Sudarwan Danim mengemukakan definisi penilaian (evaluating) adalah: “Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.

¹⁴ Dunn, (2003:608)

2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai”¹⁵.

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana.

Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya.

Menurut pendapat di atas, evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk melihat sejauh mana efisien atau program masukan (input) untuk memaksimalkan keluaran (output), evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau efektivitas, dan kesesuaian program kebijakandan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan dan gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya.

4. Konsep Pengawasan

¹⁵ Danim, 2000.

Pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, selaras dengan panduan¹⁶.

Menurut Terry (dalam salam 2007:23) Pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, selaras dengan panduan.

Menurut Manullang (2004:13) Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Menurut Newman (2006:420) mengatakan proses pengawasan memiliki standar 3 langka dasar :

- a. Standar kedudukan pada setiap strategi.

Yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan secara teori pada suatu pekerjaan merencanakan tujuan kepastian dalam sasaran-sasaran hasil yang akan dicapai.

- b. Pemeriksaan dan laporan pekerjaan.

Dalam proses pengawasan adalah membandingkan pekerjaan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan.

- c. Tindakan perbaikan

Dapat dilaksanakan sebelum pengawasan yang sebenarnya dapat terlaksana.

¹⁶ Terry (dalam salam 2007:23)

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan¹⁷.

Mengatakan proses pengawasan memiliki standar 3 langka dasar¹⁸ :

d. Standar kedudukan pada setiap strategi.

Yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan secara teori pada suatu pekerjaan merencanakan tujuan kepastian dalam sasaran-sasaran hasil yang akan dicapai.

e. Pemeriksaan dan laporan pekerjaan.

Dalam proses pengawasan adalah membandingkan pekerjaan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan.

f. Tindakan perbaikan

Dapat dilaksanakan sebelum pengawasan yang sebenarnya dapat terlaksana.

Proses pengawasan adalah¹⁹ :

- a. Menetapkan standar
- b. Mengukur kinerja
- c. Memperbaiki penyimpangan.

Sedangkan²⁰ agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintahan melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang berjalan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.

¹⁷ Manullang (2004:13)

¹⁸ Menurut Newman (2006:420)

¹⁹ Kadarman dan Udaya (2001: 161)

²⁰ Siagian (2003:115)

- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui pelaporan yang di sampaikan oleh bawahannya yang berbentuk pelaporan tulisan dan lisan.

Objek Pengawasan secara garis besar terbagi menjadi 4 kelompok yaitu : a) kuantitas dan kualitas b) Biaya Program c) pelaksanaan d) hal-hal yang bersifat khusus. Bentuk-bentuk pengawasan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu: 1) Pengawasan Intern dan Ekstern, 2) Pengawasan preventif dan Represif, 3) Pengawasan Aktif dan pasif, dan 4) Pengawasan Kebenaran Formil²¹.

5. Konsep Pemeliharaan

Definisi pemeliharaan menurut adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki. Melakukan penyesuaian atau pengantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi agar sesuai dengan perencanaan yang ada²².

Pengertian pemeliharaan secara umum yaitu serangkaian aktivitas (baik bersifat teknis dan administrative) yang di perlukan

²¹ Munaf (2016: 102).

²² O'Connor (Dalam James 2001:407)

mempertahankan dan menjaga suatu produk atau system tetap berada pada dalam kondisi aman, ekonomis, efisien dan pengoperasian optimal²³. Aktivitas perawatan sangat diperlukan karena :

- Setiap peralatan punya umur penggunaan. Suatu saat dapat mengalami kegagalan dan kerusakan.
- Kita dapat mengetahui dengan tepat kapan peralatan akan mengalami kerusakan.
- Manusia selalu berusaha untuk meningkatkan umur penggunaan dengan melakukan perawatan.

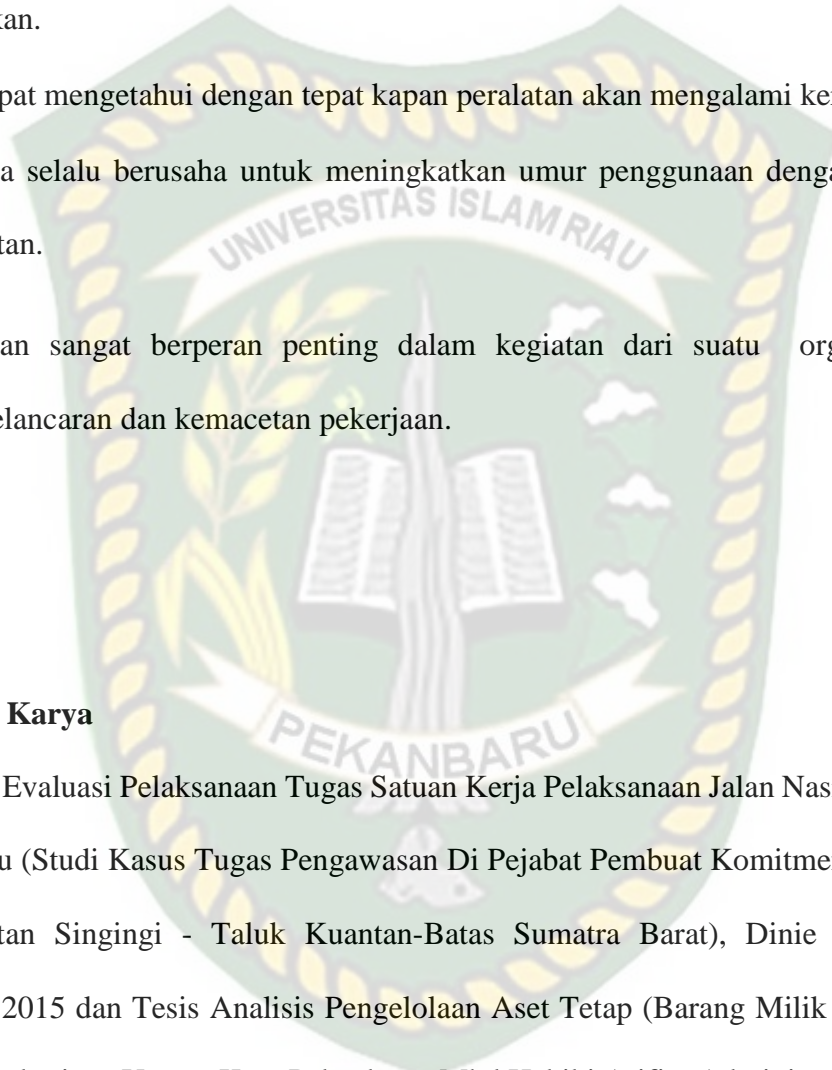
Pemeliharaan sangat berperan penting dalam kegiatan dari suatu organisasi yang menyangkut kelancaran dan kemacetan pekerjaan.

B. Ulasan Karya

Skripsi Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau (Studi Kasus Tugas Pengawasan Di Pejabat Pembuat Komitmen 9 Marpoyan - Batas Kuantan Singingi - Taluk Kuantan-Batas Sumatra Barat), Dinie Lestari, Ilmu Pemerintahan, 2015 dan Tesis Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, Mhd Habibi Arifin, Administasi, 2011.

Penelitian yang penulis lakukan tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan (Studi Pejabat Pembuat Komitmen 09 Batas Kuantan Singingi-Taluk Kuantan-Batas Sumatera Barat) tidak ada yang mengambil judul yang sama atau meneliti ditempat yang sama dengan

²³ Menurut Jr.Patton (1995:23)



penulis, Perbandingan dengan Skripsi Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau (Studi Kasus Tugas Pengawasan Di Pejabat Pembuat Komitmen 9 Marpoyan - Batas Kuantan Singingi - Taluk Kuantan-Batas Sumatra Barat) jadi pandangan peneliti terhadap penelitian ini adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum dalam pengawasan harus berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada mengenai tugas pokok dan fungsi. Evaluasi yang diteliti pada penelitian ini bagus untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau agar tercapainya perbaikan jalan yang sesuai dengan target pemerintahan. Penulisan dan penelitian karya ini lakukan penulis sendiri tidak melakukan plagiat terhadap karya orang lain, maupun penelitian yang mempunyai judul sama. Persamaan dengan Penelitian sebelumnya yaitu sama Lokus Penelitian dan Mengkaji tentang Evaluasi Tufoksi dari Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau, Perbedaannya yaitu pada Indikator Penelitian Berbeda berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011.

Sedangkan Perbandingan dengan Tesis Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru hanya membahas Pengelolaan asset tetap (Barang Milik Negara) penelitian saya membahas tentang bagaimana pengawasan pemeliharaan Jalan yang merupakan barang milik Negara jadi pembahasannya berbeda. dan Lokus penelitiannya juga berbeda yaitu di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dan saya penelitian di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Jadi, secara tidak langsung penelitian yang saya lakukan lebih meyeluruh dan lengkap dengan pembahasan yang luas tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan (Studi Pejabat Pembuat Komitmen 09 Batas Kuantan Singingi-Taluk Kuantan-Batas Sumatera Barat) dibandingkan dengan Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian “**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau**” kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian.

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan yaitu objek dan subjek pelaksanaan tugas pemeliharaan jalan nasional yang dijadikan indikator akan menampilkan gambar sebagai berikut :

**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan**

Nasional Wilayah II Provinsi Riau



Sumber : Data Modifikasi Penelitian, 2016

D. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan batasan konsep yang akan dioperasionalkan yang kemudian akan diuji melalui pengukuran.

Adapun konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah semua badan organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat dalam penelitian pemerintahan adalah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau.
2. Evaluasi yaitu perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisis akhir, apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.
3. Pengawasan proses untuk memastikan bahwa segala yang pekerjaan yang dilakukan sudah terlaksana dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
4. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki.
5. Kemajuan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan adalah suatu keadaan dimana adanya perkembangan fisik dan keuangan dalam pemeliharaan Jalan
6. Kondisi Jalan adalah Suatu Kondisi Jalan dalam keadaan mantap dapat dipergunakan semaksimal mungkin oleh pengguna Jalan.
7. Kualitas Kerja adalah Suatu Ukuran Kualitas pekerjaan dapat dikatakan baik atau tidak sesuai dengan fakta di Lapangan.
8. Keselamatan Pengguna Jalan adalah Suatu Kondisi dalam melakukan pemeliharaan Jalan Keselamatan dari Pengguna Jalan menjadi Prioritas Utama dengan memberikan tanda-tanda adanya perbaikan.

Konsep Operasional dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah

untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Digunakan konsep ini berkaitan dengan indikator untuk terlaksananya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, jika konsep tugas dilaksanakan sesuai dengan peraturan maka kondisi jalan akan bagus sesuai dengan laporan pegawai Lapangan, Kualitas Kerja akan meningkat dan Keselamatan Pengguna Kan terjamin serta Otomatis Kemajuan Pelaksana Fisik dan Keuangan akan berjalan sesuai dengan peraturan untuk menunjang kebutuhan masyarakat Pengguna Jalan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Digunakan konsep ini berkaitan dengan indikator Pengawasan Pemeliharaan. Jadi mengetahui bagaimana pengawasan dan pemeliharaan jalan nasional oleh Satuan Kerja Pelaksanan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau²⁴.

Evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasil (Ndara,1999). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan dengan kejadian yang sebenarnya. Digunakan konsep ini berkaitan dengan indikator Penilaian hasil pemeliharaan jadi melihat hasil pemeliharaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksanan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau sudah memnuhi kelayakan jalan atau belum.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian penelitian ini dari satu variabel dengan dua indikator ini, maka melakukan operasional variabel yang teruang dalam tabel dibawah ini :

Tabel I.1 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian
1	2	3	4	5

²⁴ Manullang (2004:13)

<p>Evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasil (Ndara,1999). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan dengan kejadian yang sebenarnya.</p>	<p>Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Pemeliharaan dan Penilikan Jalan oleh PPK 09.</p>	<p>1. Kemajuan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan</p>	<p>a. Kemajuan Pelaksanaan Fisik. b. Penggunaan Keuangan.</p>	<p>Baik Cukup baik Kurang baik</p>
<p>Said Zainal (2012 : 19) mengemukakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang di buat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.</p>		<p>2. Kondisi Jalan</p>	<p>a. Pengawasan kondisi Jalan. b. Laporan Pengawas Lapangan.</p>	<p>Baik Cukup baik Kurang baik</p>
		<p>1. Kualitas Kerja</p>	<p>a. Kualitas Kerja. b. Besar Perubahan Jalan.</p>	<p>Baik Cukup baik Kurang baik</p>
		<p>2. Keselamatan Penggunaan Jalan</p>	<p>a. Keselamatan Pengguna Jalan. b. Memberikan Rambu-rambu Adanya Pemeriharaan Jalan</p>	<p>Baik Cukup baik Kurang baik</p>

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2016



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau